



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**SUB UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **M. AL KHADZIQ**
2. Jabatan : **CALON BUPATI**
3. NHK : **400618**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.165.704.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di Tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 176.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/- m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/- m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
4. Tanah Seluas 22968 m2 di Lebak, HASIL SENDIRI Rp. 229.680.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/- m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 27.924.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/- m2 di tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 262.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA Revo Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	168.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.591.783.625
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.187.887.625
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.187.887.625

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Februari 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.